

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bidarti, Agustina. (2020). *Teori Kependudukan* Bogor: Lindan Bestari.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, Jonaedi, dan Rijadi, Prasetijo. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pernada Media.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herawati, Anita dan Oktavianoor, Husna. (2022). *Buku Ajar Pengantar Demografi*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Rajawali Pers PT Raja Grafindo.
- Moeleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmani, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar : CV SAH MEDIA.
- Simorangkir, J. C. T., Erwin, Rudy T., dan Prasetyo, J. T. (2006). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswosoediro, Henry S. (2008). *Mengurus surat – surat kependudukan (identitas diri)*. Jakarta: Visi Media.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metoologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Usman, R. (2021). *Hukum pencatatan sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Abdullah, Dudung. (2016) Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah." *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.

Marselli, Aldila, *et. al.* (2016). Upaya Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1 -19. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12229>

Nugroho, Puguh Adi, and Hardi Warsono. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 211-220.

Lindriati, S., Suntoro, I., & Pitoewas, B. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(6), 1-14.

WEBSITE

Agus Darmawan. (2024, 15 Agustus). *Presentase Penduduk di Kota Bekasi Menurut Kategori Kelompok (Data 2024)*. dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d6eec51a3d8b3d3/22-91-penduduk-kota-bekasi-pada-2024-dengan-usia-0-14-tahun> Diakses pada 12 Oktober 2024

- Arum Ratna Dewi. (2021, 31 Mei). *Pentingnya Standar Pelayanan Publik*. dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html> Diakses pada 12 November 2024
- Desa Banyurojo. (2021, 23 Agustus). *Manfaat Akta Kelahiran Bagi Warga Masyarakat*. Dari https://desabanyurojo.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/manfaat-akta-kelahiran-bagi-warga-masyarakat Diakses pada 30 Oktober 2024
- Dimas Choirul. (2022, 25 Juni). *Pemkot Bekasi Keluarkan Edaran Percepatan Penerbitan Akta Kematian*. dari <https://metro.sindonews.com/read/808179/171/pemkot-bekasi-keluarkan-edaran-percepatan-penerbitan-akta-kematian-1656097596> Diakses pada 21 November 2024
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. *Teori Pelayanan Publik*. dari <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/page/39218/teori-pelayanan-publik> Diakses pada 30 Oktober 2024
- Disdukcapil Jabar. *Tugas Pokok Dan Fungsi*. dari <https://disdukcapil.jabarprov.go.id/tugas-dan-fungsi> Diakses pada 05 Desember 2024
- Disdukcapil Kota Bekasi. *Visi Misi Layanan*, dari <https://disdukcapil.bekasikota.go.id/#>. Diakses pada 18 Desember 2024
- DPMTSP KOTA BEKASI. *Demografi Kota Bekasi*. dari <https://dpmptsp.bekasikota.go.id/mengapa-kota-bekasi/demografi> Diakses pada 16 Januari 2025
- Fikri. (2021, 14 Oktober). *Manfaat Akta Kematian Bagi Masyarakat*. dari <https://disdukcapil.limapuluhkotakab.go.id/berita/manfaat-akta-kematian-bagi-masyarakat> Diakses pada 30 Oktober 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Arti Kata Pemerintah*. dari <https://kbbi.web.id/pemerintah> Diakses pada 30 November 2024

- Mahdiyah. (2014). *Seminar dan Workshop Proposal Penelitian. In: Perumusan Masalah Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka. Halaman 1-32
<https://repository.ut.ac.id/4331/1/MPDR5300-M1.pdf>
- Media Telusur News. (2024, 2 Mei). *E-Open, Aplikasi pelayanan Kependudukan kota Bekasi Menuai Kritik Tajam*. dari <https://telusurnews.com/2024/06/02/e-open-aplikasi-pelayanan-kependudukan-kota-bekasi-menuai-kritik-tajam/>
Diakses pada 15 Januari 2025
- Open Data Bekasi Kota. (2024, 13 Desember). *Sebaran Penduduk Kota Bekasi Tahun 2023*. dari <https://opendata.bekasikota.go.id/infografik/sebaran-penduduk-kota-bekasi-tahun-2023-2> Diakses pada 04 Desember 2024
- Open Data Jabar. (2024). *Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-yang-memiliki-akta-kelahiran-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat> Diakses pada 21 November 2024
- Ratih Prihatina. (2022, 14 Oktober). *Pelayanan Publik: Mari bersemangat memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasadari*
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15543/Pelayanan-Publik-Mari-Bersemangat-Memberikan-Pelayanan-Terbaik-Bagi-Para-Pengguna-Jasa.html> . Diakses pada 30 November 2024
- Serafica Gischa. (2022, 6 Juni). *Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli dan Kriteria Pemberiannya*. dari <https://www.kompas.com/skola/read/pengertian-otonomi-daerah-menurut-para-ahli-dan-kriteria-pemberiannya> Diakses pada pada 30 November 2024
- Tim KPAI. (2013, 5 Juni). *Akta Kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia, Batalkan UU yang mempersulit pembuatan akta kelahiran*. dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran>
Diakses pada 01 Desember 2024

Worldometer. (2024). *Indonesia Population*. dari

<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

Diakses pada 12 Oktober 2024

PERATURAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pesyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Diterima Riset Penulisan Hukum

1.1 Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KASBANGPOL)



PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17141
Email : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com Website : kesbangpol.bekasikota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.14.5.4/109/BADAN KESBANGPOL.Poldagri

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : B/1416/UN23.5.1/PK.01.06/2024 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 000.9.6.1/4001/DISDUKCAPIL.Set Tanggal 20 Desember 2024 Perihal Permohonan Riset.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Menerangkan bahwa:

a. Nama / NIM	: Shafa Kamelia Putri / 11000121140698
b. No, Tlp / Gmail	: 0852 1265 2503
c. Program Studi	: Hukum Tata Negara/Kependudukan
d. Nama/Alamat Universitas	: Universitas Diponegoro Jl. dr. Antonius Suroyo Tembalang Semarang
e. Peserta	: 1 (Satu) Orang
f. Maksud	: Permohonan Riset
g. Keperluan	: Melaksanakan Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Judul "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan"
h. Lokasi	: Kota Bekasi
i. Lembaga/ Instansi yang dituju	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan ini.
3. Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal 27 Desember 2024 s.d 27 Maret 2025 dan Melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bekasi, 30 Desember 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi



Nesan Sujana, S.T., M.T., CGCAE
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 1974070820031214007

1.2 Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bekasi (Disukcapil Kota Bekasi)



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113
Telepon (021) 88342729, Faksimile (021) 88342729
Laman disukcapil.bekasikota.go.id, Pos-el disukcasipkotabekasi100@gmail.com

Bekasi, 20 Desember 2024

Nomor : 000.9.6.1/ 4001 /DISDUKCAPIL.Set
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Riset

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bekasi
di
Tempat

Berkenaan surat Dekan Universitas Diponegoro Nomor : 855/UN7.F1/AK/XII/2024
tanggal 19 Desember 2024 hal Permohonan Riset/Penelitian untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan Program study Mahasiswa :

Nama : Shafa Kamelia Putri
N P M : 11000121140698
Bidang Minat : Hukum Tata Negara/Kependudukan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Dan Akta kematian
Di Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Nomor Hp : 085212652503

Bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan mahasiswa dimaksud melaksanakan
Riset/Penelitian di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Dian Damayanti, S.IP., M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19670607 198710 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wil.III Bekasi.

2. Dokumentasi Pelaksanaan Riset Penulisan Hukum Dengan Metode Wawancara

